

Jejak Musim, Jejak Cerita: Kolaborasi Warga Menjaga Hutan





PENGANTAR



Bagaimana petani Watu-Watu membaca musim melalui perilaku lebah trigona? Seberapa penting melakukan pemetaan dalam program RBP REDD+?

Edisi kali ini mengangkat dua pendekatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan: Pemetaan Aktor dan Kalender Musim. Pemetaan Aktor mengajarkan kita tentang pentingnya mengenali setiap pihak yang terlibat, memahami perannya, dan membangun jejaring kolaborasi. Sementara Kalender Musim mengingatkan kita akan pentingnya menyelaraskan aktivitas dengan ritme alam yang telah berjalan ribuan tahun.

Yang istimewa dari edisi ini adalah bagaimana kedua pendekatan teknis tersebut hidup dan bernafas dalam kearifan lokal masyarakat. Dari petani di Watu-Watu yang membaca musim melalui perilaku lebah Trigona, hingga kelompok tani di Arongo yang membangun sistem koordinasi yang solid antar lembaga. Kami percaya bahwa program REDD+ tidak hanya tentang angka emisi karbon atau teknik konservasi, tetapi lebih tentang manusia yang hidup harmonis dengan alamnya. Setiap halaman dalam buletin ini adalah testament akan komitmen tersebut.

Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari terus bersama menorehkan jejak lestari untuk generasi mendatang.

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar	3
Cerita Lapangan	4
Pemetaan Aktor	8
Kalender Musim	11
Project Highlight	11
Galeri Visual	12
Informasi & Kegiatan Mendatang	15
Mekanisme Penanganan Keluhan	16
Penutup	17



DENGUNG KECIL DARI HUTAN YANG MENGAJARKAN WAKTU

Oleh: La Ode Abdul Rahman

Kehidupan yang Tergantung pada Tanda Alam

Fajar mulai menyingsing di Kelurahan Watu-Watu. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan di kawasan Tahura Nipa-Nipa ketika Putu sudah berdiri di depan rumahnya, matanya tertuju pada gerombolan kecil lebah Trigona yang mulai beraktivitas, pertanda musim hujan tak lama lagi akan berakhir.

Sekitar 4 tahun lalu, Putu mencoba budidaya lebah tirgona. Awalnya Putu mengalami kegagalan dalam budidaya ini, namun tidak menyerah sampai disitu saja ia terus belajar, termasuk mengikuti pelatihan dari tim yang datang dari Landono. Kini budidaya lebah trigona Putu sudah berhasil. Panen madu dilakukan satu kali dalam setahun karena lebah ini hanya membawa sari bunga, bukan madu dalam bentuk langsung.

Bagi masyarakat sekitar hutan, membaca tanda-tanda alam jadi cara untuk bertahan dan hidup selaras dengan alam. Lebah Trigona, telah menjadi penjaga waktu alami bagi masyarakat setempat. Ketika pohon durian mulai berbunga, pertanda waktu yang tepat untuk mempersiapkan panen madu. Alam selalu memberikan petunjuk, tinggal kita yang harus peka melihatnya.



Dari Pengetahuan Lokal ke Pendekatan Ilmiah

Pengetahuan lokal ini kemudian menjadi pondasi kokoh dalam penyusunan Kalender Musim partisipatif. Melalui serangkaian FGD, masyarakat diajak mendokumentasikan dan mensistematisasikan kearifan mereka menjadi alat perencanaan yang ilmiah namun tetap mengakar pada budaya lokal. Di sekeliling hutan, terdapat jaring-jaring manusia dengan peran, kepentingan, dan hubungan yang kompleks. Dari sinilah Pemetaan Aktor hadir sebagai upaya untuk mengenali setiap pihak, melihat hubungan di antara mereka, dan menemukan titik temu untuk kolaborasi yang saling menguntungkan.

Dalam kesunyian hutan, kita belajar bahwa kelestarian bukan hanya tentang melindungi pohon dan satwa, tetapi juga tentang merawat hubungan antara manusia dengan alam, antara manusia dengan manusia, dan antara masa lalu dengan masa depan. Alam, manusia, dan waktu adalah tiga serangkai yang tak terpisahkan. Seperti halnya lebah Trigona yang tak bisa hidup tanpa bunga, dan bunga yang tak bisa berbuah tanpa lebah, kita manusia tak bisa hidup tanpa alam. Menjaga hutan berarti memahami peran masingmasing dan hidup selaras dengan irama alam yang telah ditetapkan.



SAWAH BISA JADI LAUT:

Ketika Mangrove Menjaga Nafas Warga Pesisir

Oleh: Waode Mar'atun Sholiha

Menanam Mangrove, Melindungi Sawah

"Dulu, air pasang sampai masuk ke sawah sehingga sawah kami asin dan gagal panen. Itu seperti mimpi buruk," kenang Syamsuddin (46), warga Matabubu Jaya, dengan raut wajah serius. Ancaman abrasi dan intrusi air laut bukan lagi sekedar teori, melainkan kenyataan pahit yang menghantui kehidupan mereka setiap hari. Desa Matabubu Jaya yang terletak di pesisir Konawe Selatan selama bertahun-tahun menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Gelombang laut yang semakin ganas menggerus garis pantai, mengancam rumah dan lahan pertanian warga.

Perjalanan menuju izin kelola dimulai pada 2018, ketika masyarakat bersama pemuda desa mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan ini didukung pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta difasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gularaua. Setelah verifikasi, pada Maret 2021 terbit Surat Keputusan Hutan Desa Kondapute Bose-bose. Sejak itu, pengelolaan dilakukan lebih terarah, termasuk rencana pembukaan tambak ramah lingkungan sesuai Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Menurut Syamsuddin, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), gagasan ini lahir dari obrolan santai di antara pemuda desa. "Kami melihat potensi besar di kawasan ini, dan berpikir kenapa tidak kita kelola sendiri? Sebagian lahannya juga merupakan lahan pertanian dan perkebunan," ujarnya. Dukungan warga desa memperkuat langkah itu hingga izin resmi didapatkan.



Bagi masyarakat Matabubu Jaya, mangrove adalah pelindung utama. Saat air pasang, akar mangrove menahan gelombang agar tidak merendam sawah. "Kalau mangrove hilang, sawah-sawah bisa jadi lautan. Bisa habis semua," tegas Syamsuddin. Kesadaran ini membuat masyarakat memahami bahwa menjaga mangrove berarti menjaga ketahanan pangan mereka.

Pelindung Sekaligus Alternatif Sumber Penghidupan Baru

Selain fungsi perlindungan, mangrove juga menyimpan potensi ekonomi. Kawasan ini menjadi habitat kepiting bakau, kerang, ikan, dan udang yang bernilai jual. Buah mangrove pun berpotensi dimanfaatkan, meski pemasarannya membutuhkan sertifikasi benih agar legal dan berkelanjutan. "Tanpa mangrove, kepiting dan kerang tidak akan berkembang biak di sini. Itu sebabnya kami anggap mangrove sebagai sumber hidup," tambah Syamsuddin.

Ke depan, LPHD bersama warga berharap ada dukungan untuk pengembangan usaha produktif, termasuk sertifikasi benih mangrove dan ekowisata berbasis konservasi. Potensi wisata edukatif di kawasan ini diyakini mampu menambah pendapatan desa sekaligus memperkuat kesadaran menjaga lingkungan.

Cerita Matabubu Jaya adalah potret ketahanan dan transformasi. Mereka membuktikan bahwa merawat mangrove bukan sekadar soal menanam pohon, melainkan tentang memulihkan siklus kehidupan dari yang terancam menjadi kembali berdaya. "Kami belajar bahwa ketika kami merawat alam, alam akan merawat kami," refleksi Syamsuddin. Mangrove telah menjadi penjaga hidup, penjaga napas warga pesisir.





PEMETAAN AKTOR

Pemetaan aktor merupakan proses sistematis untuk mengenali, menganalisis, dan memahami semua pihak, baik individu, kelompok, maupun lembaga yang memiliki peran, pengaruh, dan kepentingan terhadap pengelolaan hutan. Dalam konteks RBP REDD+, pemetaan aktor menjadi langkah awal untuk membaca "peta sosial" di balik bentang alam: siapa pengambil keputusan, siapa penggerak lapangan, dan siapa yang terdampak langsung oleh program.

Menurut Yunindyawati dkk. (2022), pemetaan aktor tidak hanya membantu mengenali pihak terlibat. yang tetapi juga memperlihatkan bagaimana jejaring hubungan dan pengaruh antar aktor terbentuk dalam suatu sistem sosial1. Dengan cara ini. kita dapat membangun kolaborasi lintas pihak, mencegah konflik, dan memastikan semua suara terutama masyarakat adat, perempuan, dan kelompok muda dapat terwakili dalam pengambilan keputusan.



Proses Pemetaan Aktor di Lapangan:

Proses pemetaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Setiap tahapannya menggabungkan observasi sosial, diskusi terbuka, dan analisis peran untuk memahami dinamika hubungan yang terjadi.

Langkah-langkah utama yang diterapkan di lapangan meliputi:

- FGD Awal (Focus Group Discussion): Menjelaskan tujuan dan pendekatan kepada masyarakat serta mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
- Identifikasi dan Pengelompokan Aktor: Masyarakat bersama fasilitator menyusun daftar aktor yang memiliki pengaruh atau kepentingan terhadap sumber daya alam di wilayahnya.
- Analisis Peran dan Pengaruh: Setiap aktor dianalisis berdasarkan tingkat kekuatan (power) dan kepentingannya (interest), menggunakan alat bantu visual seperti matriks atau warna.
- Visualisasi Jaringan Hubungan: Hasil analisis dituangkan dalam bentuk peta sosial yang menggambarkan pola hubungan antar aktor.
- Validasi Hasil: Peta yang dihasilkan kemudian diverifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian dengan realitas sosial di lapangan.

Pendekatan seperti ini terbukti efektif meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pemetaan, sebagaimana ditemukan dalam studi pemetaan sosial di Purbalingga, dimana warga terlibat langsung sejak tahap identifikasi hingga validasi hasil².

^a Kumala, F.Z., & Albab, M.U. (2022). Social Mapping: Analisis Aktor dan Potensi Sosial pada Masyarakat Kelurahan Karangsentul Kabupaten Purbalingga. ICODEV Journal, 3(2), 63–73.

Aktor Kunci Yang Teridentifikasi:

Pemerintah Desa

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD sebagai pengambil kebijakan dan pengarah kegiatan.

Kelompok Masyarakat

KTH, LPHD, kelompok perempuan, pemuda, serta UMKM desa berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan konservasi.

Lembaga Pemerintah

KPH, Tahura, dan BAPPEDA, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengawas dan penyedia dukungan teknis. Hasil pemetaan aktor di beberapa desa dalam implementasi RBP REDD‡ memperlihatkan adanya beragam aktor dengan fungsi dan posisi strategis:

Tokoh Masyarakat dan Adat

Menjaga nilai-nilai budaya, menjadi mediator sosial, serta menyelesaikan sengketa lokal.

Lembaga Pendamping

LSM, perguruan tinggi, dan fasilitator lapangan sebagai penguat kapasitas dan jembatan antara masyarakat dan kebijakan.

Dalam banyak kasus, kekuatan hubungan sosial antara lembaga desa, tokoh adat, dan kelompok masyarakat menjadi pondasi utama dalam menciptakan tata kelola hutan yang partisipatif³.

*Nugroho, B.A., & Damanik, J. (2020). Dinamika Aktor dalam Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tuban. Journal of Social Development Studies, 1(1), 37-46.



KALENDER MUSIM

Kalender musim adalah alat perencanaan waktu berbasis tanda-tanda alam yang digunakan masyarakat untuk menentukan waktu tanam, panen, dan kegiatan penting lainnya sepanjang tahun. Bagi masyarakat pedesaan dan sekitar hutan, kalender ini berfungsi seperti "jam ekologis" yang mengatur ritme kehidupan dari siklus pertanian, perikanan, hingga pengumpulan hasil hutan non-kayu seperti madu dan rotan.

Menurut Gustaman (2020), sistem kalender tradisional seperti Pranatamangsa di Jawa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah lama memiliki pemahaman ekologis yang tinggi terhadap perubahan iklim dan musim⁴. Dalam konteks RBP REDD+, pemahaman serupa digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pengelolaan hutan dan lahan dengan kondisi cuaca yang dinamis, sehingga program berjalan seirama dengan ritme alam.

Kalender Musim Desa Matabubu Jaya

KOMODITI/JENIS TANAMAN : Mangrove Jenis Jiropat (Akar Tanjung)

Aktivitas/Keadaan/Kegiatan	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju I	Ags t	Sept	Okt	Nov	Des
Penanaman Mangrove		· · · · · · · ·	v	v	v	v	v	v				
Pemeliharaan Mangrove	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pengendalian Hama Kambing	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pengendalian Hama Ombak			v	v	v	v	v	v		1		

Catatan: Penanaman dianjurkan mulai Maret - Agustus sebelum musim barat. Hama utama adalah kambing yang aktif sepanjang tahun dan hama ombak yang terjadi pada saat musim barat.

PROSES PENYUSUNAN KALENDER MUSIM DI LAPANGAN

FGD Awal

Masyarakat bersama fasilitator mendiskusikan tujuan dan manfaat kalender musim.

Identifikasi Tanda Alam

Peserta menyebutkan indikator alam yang biasa mereka gunakan, seperti perilaku hewan, berbunga atau berbuahnya tanaman, arah angin, dan pola hujan.

Penyusunan Kalender

Data tersebut diterjemahkan menjadi diagram waktu yang menggambarkan kapan kegiatan pertanian, kehutanan, atau produksi madu dilakukan.

Validasi Bersama

Masyarakat memeriksa ulang hasilnya agar sesuai dengan pengalaman lokal mereka.

*Gustaman, A. (2020). Etnosains Pranatamangsa: Kearifan Ekologis Masyarakat Jawa dalam Merespons Perubahan Iklim. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

PROJECT HIGHLIGHT

Musyawarah Desa Arongo: Sinergi Multipihak Mewujudkan Pengelolaan Hutan Desa Berkelanjutan

(15/06/2025) – Musyawarah Desa Arongo diselenggarakan sebagai forum resmi untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama dalam pengelolaan kawasan hutan desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Kegiatan ini dihadiri oleh warga, pemerintah desa, KPH Gularaya, serta Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF) sebagai pendamping Program RBP REDD+ GCF Output 2. Forum ini menjadi wadah konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan kolektif.



Dalam musyawarah tersebut, Ibu Romi, Penyuluh Kehutanan **KPH** Lapangan Gularaya menegaskan bahwa hutan desa yang dikelola melalui LPHD bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikelola bersama sesuai izin yang diberikan selama 35 tahun diperpanjang. Beliau dapat menyampaikan pentingnya mengikuti Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diawali pemetaan wilayah, dengan serta menginformasikan akses bibit gratis dari Balai Benih Kehutanan melalui permohonan resmi. Penjelasan ini memberikan kejelasan hukum dan teknis bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Para petani yang hadir menyampaikan aspirasi mereka mengenai tantangan akses pasar yang berkelanjutan, di samping semangat kerja masyarakat yang tinggi. Melalui dialog terbuka, disepakati bahwa langkah-langkah teknis depan akan dirancang ke berdasarkan bersama prinsip musyawarah dan kesetaraan. Hasil musyawarah ini memperkuat komitmen pihak untuk menjaga semua keberlanjutan hutan sebagai desa sumber kehidupan dan perlindungan lingkungan.

PROJECT HIGHLIGHT

Kick-Off Program RBP REDD+ GCF Output II Sulawesi Tenggara: Memperkuat Komitmen Pengurangan Emisi Berbasis Hutan

(12-15/04/2025) — Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) resmi diluncurkan dalam Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 di Kota Baubau. Peluncuran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengurangi emisi karbon dan memperkuat perlindungan hutan. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tenggara, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan tujuh belas kabupaten/kota.



Sebagai bagian dari kegiatan, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan Wakil Gubernur Sulawesi Project Manager Program Tenggara, **RBP** REDD+ Sulawesi Tenggara, perwakilan CSF, dan peneliti BRIN. difokuskan Diskusi pada strategi implementasi program dan penguatan kelola lingkungan di Sulawesi Tenggara. Project Manager Program memaparkan target kontribusi program terhadap penurunan emisi GRK nasional.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan program RBP REDD+ ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui forum multipihak ini, terjalin koordinasi intensif pemerintah dan antara pemangku kepentingan lainnya. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan dalam program mendukung pembangunan rendah karbon di daerah.

GALERI VISUAL



11-16 April 2025

Koordinasi Lemtara, Tahura Nipa-Nipa, KPH Gularaya, dan KPH Laiwoi Tenggara.



17 April 2025

Rapat progres penyelenggaraan inventarisasi GRK bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara



6 Mei 2025

Rapat Rutin Pokja Koordinasi penyusunan FREL, SUB NFMS, dan RPHJP Provinsi Sulawesi Tenggara.



7 Mei 2025

Monitoring dan Evaluasi Q1 Lembaga Perantara (Lemtara) Sulawesi Cipta Forum (SCF)



26-27 Mei 2025

Koordinasi Penyusunan FREL, Sub NFMS dan RPHJP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.



17 Juni 2025

Identifikasi wisata Kumapo Dahu Bersama KPH Laiwoi Tenggara, Gapoktan Teporombu, dan SCF Sebagai Lemtara



30 Juni 2025

Diskusi Rencana Kerja Program REDD+ dan Desa Proklim bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara

INFORMASI & KEGIATAN MENDATANG



Penyusunan Rencana dan Revisi Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tenggara





Supervisi BPDLH Untuk Implementasi Program REDD+ Provinsi Sulawesi Tenggara



Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Usaha Petani Hutan

Sulawesi Cipta Forum

JI. Taman Gosyen Raya I, Kassi-Kassi, Rappocini, Kota Makassar, Indonesia, Sulawesi Selatan info@scf.or.id



SCF.OR.ID



@scf_id



Sulawesi Cipta Forum



Sulawesi Cipta Forum

Kanal Media Sosial

Informasi program dapat diakses melalui tautan ini



MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Ç

PENGAJUAN KELUHAN

Keluhan diterima melalui kontak keluhan 0853-9777-3020, atau melalui email info@scf.or.id yang dibuka setiap minggu

VERIFIKASI DAN PENERIMAAN

Tiap keluhan yang masuk dicatat dan dikategorikan jenisnya



PENYELIDIKAN DAN ANALISIS

Sehari setelah proses pencatatan selesai, keluhan akan dibahas dalam rapat bagian sekretaris, SDM, Logistic dan MEAL. Tim pencari fakta akan melakukan investigasi atas keluhan yang masuk. Proses investigasi dilakukan paling lama 3 hari.

PENYUSUNAN RENCANA PENYELESAIAN

Keluhan diterima melalui kontak keluhan 0853-9777-3020, atau melalui email info@scf.or.id yang dibuka setiap minggu



IMPLEMENTASI PENYELESAIAN

Proses penyelesaian keluhan akan mulai diterapkan setelah akar masalah selesai dirembukkan dan rencana tindakan rampung.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi penyelesaian akan terus dalam pemantauan. Dalam hal penanganan keluhan tidak dapat diselesaikan, akan diajukan ke rapat Dewan Board sebagai ruang pengambilan keputusan tertinggi.



PENUTUPAN KASUS

Kasus ditutup setelah keluhan ditangani.

KASUS DITUTUP SETELAH KELUHAN DITANGANI.



Scan untuk pengaduan





PENUTUP

Buletin ini kami hadirkan sebagai media berbagi pembelajaran dan capaian dalam implementasi Program RBP REDD+ GCF di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan pelaksanaan program tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelestarian hutan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh mitra kerja: BAPPEDA Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Pemerintah Desa, akademisi, mitra pembangunan, sektor privat, koperasi, perbankan, serta masyarakat Sulawesi Tenggara.

Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Tim Program Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Penanggung Jawab Program: Dr. Arham, S. P., M. Sc..
- Program Manager: Muhammad Sultan
- Tim Keuangan dan Admin: Suryana Siang R, Khaerunnisa Muhiro, Annisa Larasati Alifa P
- Tim Perencanaan, Pengelolaan GRK, Gender dan Monitoring: Muliadi Makmur, Ahsan Setiawan, Namira Arsa, Muliyadi
- Program Officer: Sairuddin Bae (PO Outcome 1), Nkilani (PO Outcome 2), La Ode Ifrisal (PO Outcome 3)
- Tim Admin dan Keuangan: Eddy Hamka dan Alma Amalia Annisa
- PPK: Isra Wariuddin
- Field Officer: Ismail Al-Jamily, La Ode Ramadhan P, Syahnuddin, Ismunandar, Ahmad Tawakkal, Fitri Hendriani, La Ode Abdul Rahman, Nurpalah, Dedi Rahmad, Dahlia, Waode Mar'atun S, Muhammad Abdul Rajab, Benyamin Boka, Makdis Askul Pehala, Wa Dewi, Artasnin Achmad, dan Intan Marwanto.

Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Tim Redaksi

KREDIT REDAKSI

Tim Redaksi Muliadi Makmur Arif Maulana Talitti Mattata Rafiqah Ulfah Masbah Waode Mar'atun Sholiha

Tim penulis Waode Mar'atun Sholiha La Ode Abdul Rahman

Editor

Arif Maulana Talitti Mattata

Desain dan Tata Letak: Waode Mar'atun Sholiha Rafiqah Ulfah Masbah

Fotografer
Waode Mar'atun Sholiha

Web: scf.or.id